

**Kantor Badan
Penyelenggara Jaminan
Produk Halal
(025.12.445372)
*Audited Tahun 2024***

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

Jl. Raya Pondok Gede Pinang Ranti No. 1
Jakarta Timur 13560



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Raya Pondok Gede Pinang Ranti No. 13 Makasar, Jakarta Timur 13560
Telp. 021 80877955 Website: www.bpjph.halal.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Penyelenggaran jaminan Produk Halal adalah salah satu entitas akuntansi yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan Akuntansi dan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu Pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Arus Kas. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan. akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna Laporan Keuangan. khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Disamping itu. laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (~~governance~~).



Jakarta, 07 Mei 2025
Sekretaris Utama

Muhammad Aqil Irham

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
3. Menteri Agama Republik Indonesia
4. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Raya Pondok Gede Pinang Ranti No. 13 Makasar, Jakarta Timur 13560
Telp. 021 80877955 Website: www.bpjph.halal.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Badan Layanan Umum yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Arus Kas. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Jakarta, 07 Mei 2025
Sekretaris Utama


Muhammad Aqil
Irham



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Raya Pondok Gede Pinang Ranti No. 13 Makasar, Jakarta Timur 13560
Telp. 021 80877955 Website: www.bpjph.halal.go.id

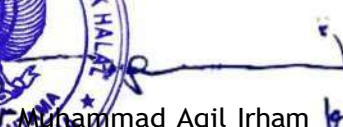
Nomor : B- /SU/B.III/05/2025 07 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Periode Semester II Periode 14 Tahun Anggaran 2024 pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Yth. Kepala KPPN Jakarta IV
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Di Jakarta

Dengan hormat. berikut kami sampaikan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Semester II Periode 14 Tahun Anggaran 2024 dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan PMK Nomor: 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 07 Mei 2025
Sekretaris Utama

Muhammad Aqil Irham

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
3. Menteri Agama Republik Indonesia
4. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Raya Pondok Gede Pinang Ranti No. 13 Makasar. Jakarta Timur 13560
Telp. 021 80877955 Website: www.bpjph.halal.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN SEMESTER II PERIODE 14 KEUANGAN BLU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk Periode Semester II Periode 14 Tahun Anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024. Laporan Operasional. Laporan Arus Kas. Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan. Saldo Anggaran Lebih. Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan lain yang terkait Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Badan Layanan Umum Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan. kecukupan dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan. pengukuran. dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan hasil reviu. kami tidak terdapat perbedaan dan menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan diatas. disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. PMK No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan PMK No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait



Jakarta 06 Mei 2025

Kepala Inspektorat Jenderal (ITJEN)

Mohamad Fitri



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca.....	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	9
V. Laporan arus Kas	10
VI. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih	11
VII. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum.....	8
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	38
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	47
G. Penjelasan Atas Pos- Pos Laporan Perubahan Sisa Anggran Lebih	48
H. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	49



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Periode Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.. yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp132.180.457.436..00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp132.180.457.436..00 atau mencapai 340 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp38.900.000.000..00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp335.241.607.648..00 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp340.539.537.000..00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset.. kewajiban.. dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp375.039.790.323 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp266.249.471.463.. Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp102.383.618.832..00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp6.406.700.028.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp36.377.585.313 dan Rp338.662.205.010.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO.. beban.. surplus/defisit dari operasi.. surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional.. surplus/defisit sebelum pos luar biasa.. pos luar biasa.. dan surplus/defisit-LO.. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp450.155.551.766.. sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional sebesar

Rp344.213.914..236 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp105.941.637.530.. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0..00 dan Rp0.. sehingga entitas mengalami S u r p l u s Defisit- LO sebesar Rp105.941.637.530..

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp233.131.197.480..00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp105.941.637.530 kemudian ditambah/mengurangi ekuitas dengan koreksi non revaluasi senilai Rp(410.630.000) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0..00. sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp338.662.205.010.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas pada BLU menyajikan informasimengetahui sumber penggunaan kas selama 1 januari sampai dengan 31 desember 2024.. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi. Arus masuk kas operasi sebesar Rp450.731.280.528..00 dikurangi arus keluar kas (Rp334.189.761.752..00).. sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp116.541.518.776..00.. arus masuk kas investasi Rp0..00 dikurangi arus kas keluar investasi (Rp1.594.150.000..00).. pendanaan sebesar Rp0..00 dan jumlah arus masuk kas transitoris sebesar Rp0..00 dikurangkan arus keluar kas transitoris sebesar Rp0..00 sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0..00 sehingga terdapat kenaikan/penurunan kas sebesar Rp114.947.368.776..00 ditambahkan dengan saldo awal kas sebesar Rp117.323.862.197..00 menjadi saldo akhir kas senilai Rp232.271.230.973..00 sedangkan rincian saldo akhir kas antara lain terdiri dari saldo akhir kas pada BLU sebesar Rp232.271.230.973..00 ditambah saldo akhir kas lainnya dan setara kas sebesar Rp0..00 sehingga jumlah rincian saldo sebesar Rp232.271.230.973..00 rincian lainnya pos kas dineraca sebesar Rp0..00 terdiri dari saldo akhir kas dibendahara pengeluaran dan saldo akhir kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp0..00

6. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.. Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal) pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp117.323.862.197..00 ditambah sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran silpa/sikpa sebesar (Rp203.061.150.212) dan ditambah penyesuaian transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp318.008.518.988..00 terdiri dari pendapatan alokasi APBN sebesar Rp318.550.823.092..00 dan penyetoran PNPB ke kas negara sebesar Rp542.304.104..00 dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran Silpa/Sikpa setelah penyesuaian sebesar Rp114.947.368.776..00 sehingga saldo anggaran lebih akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp232.271.230.973

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.. Neraca.. Laporan Operasional.. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca.. Laporan Operasional.. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BADAN PENYELNGGARA JAMINAN PRODUK HALAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI	Anggaran	REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	38.900.000.000	132.180.457.436	340	161..477.616.557
JUMLAH PENDAPATAN		38.900.000.000	132.180.457.436	340	161..477.616.557
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	23.650.501.000	23.172.620.777	98	18.735.240.983
Belanja Barang	B.3	315.287.439.000	310..474.836..871	98	313.866.686.910
Belanja Modal	B.4	1.601.597.000	1.594.150.000	100	3.961.181.175
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		340.539.537.000	335.241.607.648	98	336.563.109..068



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA**

NERACA

**KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NERACA**

PER 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2024	TA 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	32935282314	25..906.409..382
Kas Pada Badan Layanan Umum	C.2	232.271.230..973	117..323.862..197
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3		
Piutang Bukan Pajak	C.4	15859100	9.192.270
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	-79295	(45.961)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.6	15779805	9.146309
Persediaan	C.7	1.027.178.371	634.392.927.
JUMLAH ASET LANCAR		266249471463	143.873.810.815
ASET TETAP			
Tanah	C.8	2.875.200.000	2.875.200.000
Peralatan dan Mesin	C.9	95548956194	94.316..697.197
Gedung dan Bangunan	C.10	84.893..859.082	84.893..859.082
Jalan... Irigasi dan Jaringan	C.11	98.751.015	98.751.015
Aset Tetap Lainnya	C.12	25.217.500	25.217.500
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.13	-81058364959	(68.138.552.968)
JUMLAH ASET TETAP		102.383.618.832	114.071.171.826
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.14	508257350	2.567.173.500
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.15	3.408.878.341	1.258.581.087
Aset Lain-lain	C.16	361891003	0
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.17	-2446642816	(1.431.828.438)
JUMLAH ASET LAINNYA		6406700028	2.393.026.149
JUMLAH ASET		375039790323	260.338.908.790
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.18	36270229047	27.207.711.310
Pendapatan Diterima Dimuka	C.19	33424658	0
Utng Jangka Pendek Lainnya	C.20	73.931.608	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		36377585313	27.207/711.310
JUMLAH KEWAJIBAN		36377585313	27.207/711.310
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.21	338662205010	233.131.197.480
JUMLAH EKUITAS		338662205010	233.131.197.480
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		375039790323	260.338/908.790



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	T.A. 2024	T.A. 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Alokasi APBN	D.1	318.550.823.092	320.494.987.176
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		64.076.102.620	0
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain		50.471.235.000	0
Pendapatan Hibah BLU		0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU		610.955.972	1.220.400.000
Pendapatan BLU Lainnya		16.446.435.082	100.943.776.002
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	D.2	450.155.551.766	422.659.163.178
JUMLAH PENDAPATAN	D.3	450.155.551.766	422.659.163.178
BEBAN OPERASIONAL	D.4	0	0
Beban Pegawai	D.5	23.165.953.947	18.722.663.913
Beban Persediaan	D.6	469.871.559	775.578.082
Beban Barang dan Jasa	D.7	255.328.788.074	316.936.469.523
Beban Pemeliharaan		5.535.630.088	2.943.386.488
Beban Perjalanan Dinas	D.8	45.555.040.865	53.812.878.545
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		0	0
Beban Bantuan Sosial		0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi		14.158.596.369	15.434.766.297
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		33.334	17.255.586
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		344.213.914.236	408.642.998.434
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		10.594.1637.530	14.016.164.744
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset		0	0
Beban Pelepasan Aset		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non		0	-121.836.000

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		542.304.104	60.533.840.555
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		54.2304.104	60.533.840.555
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON		0	-121.836.000
SURPLUS/DEFISIT - LO		105.941.637.530	13.894.328.744



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	T.A. 2024	T.A. 2023
EKUITAS AWAL	E.1	233.131.197.480	219.235.426.486
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	105.941.637.530	13.894.328.744
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-410.630.000	1.442.250
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	7.875.000
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E.4.2	0	0
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.5	-410.630.000	-6.432.750
Koreksi Lain-Lain	E.6	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	0	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.8	105.531.007.530	13.895.770.994
EKUITAS AKHIR	E.9	338.662.205.010	233.131.197.480



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN ARUS KAS

X. LAPORAN ARUS KAS

KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	CATATAN	T.A. 2024	T.A. 2023
AKTIVITAS OPERASI	F.1	0	0
Arus Masuk Kas Operasi		0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN		318.550.823.092	320.494.987.176
Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Masyarakat		50.288.858.851	0
Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada entitas Lain		50.440.885.000	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama		640.883.130	0
Pendapatan dari Hibah		0	0
Pendapatan Usaha Lainnya		30.267.526.351	100.943.776.002
Pendapatan dan Pengembalian Belanja BLU TAYL		0	0
Pendapatan PNBPN Umum		542.304.104	60.533.840.555
Jumlah Arus Masuk Kas Operasi		450.731.280.528	481.972.603.733
ARUS KAS KELUAR OPERASI	F.2	0	0
Pembayaran Pegawai		(23..172.620.777)	(18.735..240.983)
Pembayaran Barang		(221.826.990.774)	(225.727.011.284)
Pembayaran Jasa		(36.621.868.141)	(28.245.296.910)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		(862.657.003)	(480.163.813)
Pembayaran Pemeliharaan		(5.535.630.088)	(2.941.465.356)
Pembayaran Perjalanan Dinas		(45.555.040.865)	(53.852.530.547)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU		(72.650.000)	(2.620.219.000)
Pembayaran Bantuan Sosial		0	0

Pembayaran Barang Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat		0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		0	0
Penyetoran PNPB ke Kas Negara		(542.304.104)	(60.533.840.555)
Jumlah Arus Keluar Kas Operasi		(334.189.761.752)	(393.135.768.448)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		116.541.518.776	88.836.835.285
Aktivitas Investasi	F.3	0	0
Arus Masuk Kas Investasi		0	0
Penjualan atas Tanah		0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0	0
Penjualan atas Irigasi dan Jaringan		0	0
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya /Aset Lainnya		0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN /BA BUN Investasi		0	0
Jumlah Arus Masuk Kas Investasi		0	0
Arus Kas Keluar Investasi	F.4	0	0
Perolehan atas Tanah		0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin		(1.594.150.000)	(3.961.181.175)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan		0	0
Perolehan atas Jala.. Irigasi dan Jaringan		0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya		0	0
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
Jumlah Arus Keluar Kas Investasi		(1.594.150.000)	(3.961.181.175)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.594.150.000)	(3.961.181.175)
Aktivitas Pendanaan	F.5	0	0
Arus Masuk Kas Pendanaan		0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran Ke		0	0

Kas Negara			
Jumlah Arus Masuk Kas Pendanaan		0	0
Arus Keluar Kas Pendanaan	F.6	0	0
Penyetoran Ke Kas Negara		0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
Jumlah Arus Keluar Pendanaan		0	0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Kas Pendanaan		0	0
Aktivitas Transitoris		0	0
Arus Masuk Kas Transitoris	F.7	0	0
Penerimaan Perhitungan Ketiga		0	2.007.456.986
Penerimaan atau Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain		0	0
Jumlah Arus Masuk Kas Transitoris		0	2.007.456.986
Arus Keluar Kas Transitoris	F.8	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		0	2.007.456.986
Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU Kepada BLU Lain		0	0
Jumlah Arus Keluar Kas Transitoris		0	2.007.456.986
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0	0
Kenaikan/Penurunan Kas		114.947.368.776	84.876.654.110
Penyesuaian atas Selisih Kurs		0	0
Saldo Awal Kas		117.323.862.197	32.448.208.087
Koreksi Saldo Kas		0	0
Saldo Akhir Kas		232.271.230.973	117.323.862.197
Rincian Saldo Akhir Kas Antara Lain		0	0
Saldo akhir Kas Pada BLU		232.271.230.973	117.323.862.197
Saldo Akhir Kas Lainnya dan setara Kas		0	0
Investasi Jangka Pendek BLU		0	0
Saldo akhir Dana Kelolaan BLU		0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi		0	0

Penggunannya			
Jumlah Rincian Saldo		232.271.230.973	117.323.862.197
Rincian Lainnya Pos Kas Neraca		0	0
Saldo Akhir Kas Pada BLU (Yang Belum Disahkan)		0	0
Saldo Akhir Kas Dibendahara Pengeluaran		0	0



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PERUBAHAN SISA ANGGARAN LEBIH

XI. LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH**KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH****Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**

URAIAN	CATATAN	T.A. 2024	T.A. 2023
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	G.1	117.323.862.197	32.448.208.087
Pengguna SAL	G.2	0	0
Sub Tota;	E.3	117.323.862.197	32.448.208.087
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA?SIKPA)	E.4	(203.061.150.212)	(175.085.492.511)
Penyesuaian Silpa/Sikpa		0	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN		318.008.518.988	259.961.1486.621
Pendapatan Alokasi APBN	E.4.1	318.550.823.092	320.494.987.176
Penyetoran PNBK Ke Kas Negara	E.4.2	(542.304.104)	(60.533.840.555)
Penyetoran Surplus Ke Kas Negara	E.5	0	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	E.6	0	0
Transaksi Antar BLU	E.7	0	0
Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) Setelah Penyesuaian	E.8	114.947368.776	84.875654.110
SUB TOTAL	E.9	232.271.230.973	117.323.862.197
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya		0	0
Lain lain		0	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir		232.271.230.973	117.323.862.197



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi Halal

Sejarah BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama berdasarkan Undang – undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal. Sertifikasi Halal. Verifikasi Halal. Melakukan Pembinaan serta Melakukan Pengawasan Kehalalan Produk. Kerjasama dengan seluruh Stakeholder terkait. serta Menetapkan Standard Kehalalan sebuah Produk. Satuan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak tanggal 02 Januari 2019 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019.

Rencana Strategis BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.. perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Kantor Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang layanan sertifikasi halal.. dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.. serta program kerukunan umat beragama dengan cakupan Program Sekretariat Utama pada Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal Republik Indonesia. Melalui peran Kantor Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel.. akurat.. dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas.. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia.berkomitmen dengan visi:

“Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia.”

Untuk mewujudkan visi tersebut.. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia.melakukan langkah- langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas
2. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif;;
3. Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standardisasi jaminan produk halal;).
4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi

Susunan Dewan Pengawas dan Pengelola BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal BPJPH

Berdasarkan surat Berdasarkan Surat Penunjukan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-235/MA/KP.00/07/2024 tentang Penujukan Pihak yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pejabatyang melaksanakan beberapa kewenangan Dewan Pengawas. yaitu sebagai berikut :

- Dewan Pengawas:Prof.Dr. H.Muhammad Ali Ramdhani. STP. MT (Sekretaris Jenderal)
- Susunan Pengelola pada BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut
- Kepala Badan : Dr. Ir. Ahmad Haikal Hasan . M.MT
- Wakil Kepala Badan : Dr.Ir.H. Afriansayah Noor. S.T.. M.Si.. IPU.
- Inspektorat : H. Mohamad Fitri. S.Ag.. M.Ak
- Kepala Biro Perencanaan dan Informasi : Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan . S.Ag. M.Pd
- Kepala Biro Hukum. SDM dan Humas : Indrayani. M.Pd
- Kepala Biro Umum dan keuangan : Dr. Drs.Sukismanto Aji. M.Si
- Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal: Dr. H. Abd. Syakur. S.Ag.. M.Si
- Deputi Bidang Registrasi dan Serifikasi Halal: Dr. H. Mamat Salamet Burhanudin. M.Ag

- Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal: HE. A. Chuzaemi Abidin . SH. MM
- Direktur Kemitraan dan Kerja Sama: Fertiana Santy. S. Kep.. Ns. MPPM.. Ph.D
- Direktur Registrasi Halal : Muhammad Jamaludin. S.Ag.. M.Pd.I
- Direktur Sertifikasi Halal : Yanis Naini. SE.. M.Ak
- Direktur Binan Jaminan Produk Halal: Drs Mohammad Farid Wajdi. M.M
- Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal: H. Budi Setyo Hartoto. SE.. M.M
- Kepala Pusat Data dan Informasi: H. Nurhanudin . ST.. M.Kom
- Kepala Pusat Pengembangan SDM Jaminan Produk Halal: Indrayani. M.Pd

Sedangkan Struktur Pengelolaan Keuangan pada BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Drs. Muhammad Aqil Irham. M.Si
- Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Utama : Muhammada Tajussalthin. S.Pd.. MM
- Pejabat Pembuat Komitmen deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal: Herniaty. S.Kom
- Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasai Halal: Asep Saepurohman. SE
- Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal: Zaenudin. S.Ag
- Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar: Ridho Fitrah Hyzkia. SE.. Ak.CA
- Bendahara Pengeluaran: Yeni Windriasih. SE
- Bendahara Penerimaan: Lubna Gustiningrum. S.Pd.I

Jumlah Karyawan BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 31 Desember 2024 mempunyai karyawan sejumlah 203 orang. dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pegawai PNS	152 orang
2.	Pegawai Non PNS	51 orang
Total		203 Orang

Kriteria

- a. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran. Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
- f. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 Teknis Penatausahaan. Pembukuan. dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan *Monitoring* Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan. Pembukuan. dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Ikhtisar kebijakan akuntansi

Laporan Keuangan Juni Semester I Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan Aplikasi MonSAKTI yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Laporan Keuangan ini disusun menggunakan:

- a. Modul Persediaan pada Aplikasi SAKTI;
- b. Modul Aset Tetap pada Aplikasi SAKTI;
- c. Modul GLP pada Aplikasi SAKTI;
- d. Aplikasi MonSAKTI.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia. sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Peraturan Menteri keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem

Penyusunan Laporan Keuangan Basis Akuntansi

Laporan Keuangan BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Periode Semester I Tahun Anggaran 2024. terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Arus Kas. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. yaitu:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memuat informasi mengenai Pendapatan. Belanja Pegawai. Belanja Barang serta Belanja Modal. Belanja Bunga. Belanja Bantuan Sosial. dan Belanja Tak Terduga;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal SiLPA/ SiKPA koreksi dan SAL akhir;
- c) Neraca memuat informasi mengenai Aset. Kewajiban dan Ekuitas;
- d) Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan - LO. beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas;
- e) Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh entitas selama Semester I Tahun Anggaran 2024;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal. surplus/ defisit - LO. koreksi dan ekuitas akhir;

- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai;
- h. Penerapan Accrual Basis digunakan dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan penerapan Cash Basis untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Accrual Basis adalah dasar akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Cash Basis adalah dasar akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasar basis kas sehingga pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas. serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2024 ini merupakan laporan Periode Tahun 2024 yang dikelola oleh Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi yang terintegrasi terdiri dari modul penganggaran.. modul pelaksanaan anggaran dan modul pelaporan. Sakti modul pelaporan meliputi ruang lingkup modul persediaan.. modul aset tetap.. modul piutang dan modul GLP. Modul persediaan digunakan untuk pentausahaan.. pengakuntasian dan pelaporan barang persediaan. Modul aset tetap digunakan untuk pentausahaan.. pengakuntasian dan pelaporan BMN berupa Aset Tetap dan Aset Tak berwujud. Modul piutang digunakan untuk penatausahaan dan pengakuntasian piutang PNBK. Kemudian modul GLP digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan pada tingkat Satuan Kerja.

Laporan Keuangan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Tahun 2024 ini merupakan laporan rekonsiliasi dari seluruh stakeholder pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca.. Laporan Operasional.. dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip.. dasar-dasar.. konvensi-konvensi.. aturan-aturan.. dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan.. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu.. dalam penyusunannya telah diterapkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 291/PB/2012 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.. terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto.. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.. dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi.. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto.. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.. dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran.. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas.. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar.. Aset Tetap.. Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan.. dipakai.. atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang

dipersamakan.. yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir.. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas.. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah.. jalan/irigasi/jaringan.. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus.. ketinggalan jaman.. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang.. rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR).. atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya.. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA).. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar.. aset tetap.. dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud.. dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi.. Hak Paten Sederhana.. Merk.. Desain Industri.. Rahasia Dagang.. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.. Paten Biasa.. Perlindungan Varietas.. Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan.. Paten Biasa.. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II.. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan.. Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga.. Belanja yang Masih Harus Dibayar.. Pendapatan Diterima di Muka.. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang..dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara asset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi.. Hak Paten Sederhana.. Merk.. Desain Industri.. Rahasia Dagang.. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.. Paten Biasa.. Perlindungan Varietas.. Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan.. Paten Biasa.. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II.. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan.. Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama.. Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua.. keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja.. antara lain:

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	38.900.000.000	38.900.000.000
Jumlah Pendapatan	38.900.000.000	38.900.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	20.144.467.000	23.650.501.000
Belanja Barang	318.101.767.000	315.287.439.000
Belanja Modal	2.431.597.000	1.601.597.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	340.677.831.000	340.539.537.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan
Rp132.180.457.436

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp132.180.457.436..00 atau mencapai 33..9 persen dari estimas pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp38.900.000.000..00. Pendapatan di lingkup Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	6.397.925.000	50.288.858.851	786..02
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	613.475.000	640.883.130	104..47
Pendapatan dari Pelayanan BLU	25.000.000.000	50.440.885.000	201..76
Pendapatan layanan jasa perbankan BLU	3.200.000.000	8.942.258.325	279..45

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	2024		%
	Anggaran	Realisasi-	
Pendapatan lain lain BLU			-
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (Pendapatan Sewa Tanah.. Gedung.. dan Bangunan; Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya)	3.148.600.000	21.315.770526	676..99
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	540.000.000	9.497.500	1..76
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	0	9.192.270	
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	0	533.111.834	
Jumlah	38.900.000.000	132.180.457.436	339..8

*Realisasi Belanja
Negara
Rp335.241.607.648*

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp347.798.273.076 atau 96..05% dari anggaran belanja sebesar Rp362.096.308.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	23.650.501.000	23.172.620.777	98
Belanja Barang	315.287.439.000	310.474.836.871	98
Belanja Modal	1.601.597.000	1.594.150.000	100
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	340..539.537.000	335.241.607.648	98

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2023.. Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 10..80%. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 (sampai dengan 31 Desember 2024) dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.	REALISASI T.A.	%
	2024	2023	
Belanja Pegawai	23.172.620.777	18.735.240.983	99
Belanja Barang	310.474.836.871	313.866.686.910	99
Belanja Modal	1.594.150.000	3.961.181.175	100
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	335.241.607.648	336.563.109.068	99

B.2.1 Belanja Pegawai

Rp67.372.943.691

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.172.620.777..00 dan Rp 18.735.240.983..00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara.. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 98 % (persen).dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai P3K yang pindah ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.. ad juga yang pensiun dan meninggal.. sehingga menurunkan belanja gaji pokok PNS dan tidak berpengaruh pada turunnya nilai belanja gaji pokok PNS dibandingkan tahun lalu.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	7.610.930.500	7.223.871.800	1.05
Belanja Pembulatan Gaji PNS	106.503	119.233	0.89
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	536.598.060	491.987.296	1.09
Belanja Tunj. Anak PNS	170.044.852	158.052.822	1.08
Belanja Tunj. Struktural PNS	346.750.000	262.970.000	1.32
Belanja Tunj. Fungsional PNS	546.048.000	608.708.000	0.90
Belanja Tunj. PPh PNS	93.001.430	40.024.153	2.32
Belanja Tunj. Beras PNS	399.541.140	405.117.480	0.99
Belanja Uang Makan PNS	842.462.000	734.526.000	1.15
Belanja Tunjangan Umum PNS	236.280.000	239.415.000	0.99
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	10.781.762.485	10.164.791.784	1.06
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.541.490.400	35.598.000	43.30
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	22.753	316	72.00
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	78.661.920	2.373.200	33.15
Belanja Tunj. Anak PPPK	20.637.472	474.640	43.48

Belanja Tunj. Fungsional PPPK	240.112.000	5.820.000	41.26
Belanja Tunj. Beras PPPK	77.779.080	2.027.760	38.36
Belanja Uang Makan PPPK	198.929.000	4.514.000	44.07
Belanja Uang Lembur	39.654.000	8.973.000	4.42
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	8.696.681.999	8.469.679.630	1.03
Belanja Pegawai Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.502.404.930	40.991.724	36.65
Jumlah Belanja kotor	23.178.136.039	18.735.244.054	1.24
Pengembalian Belanja Pegawai	5.515.262	3.071	17.96
Jumlah Belanja	23.178.136.039	18.735.244.054	1.24

Belanja Barang

B.2.2 Belanja Barang

Rp297.173.617.400

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp250.569.804.031..00 dan Rp205.693.565.405..00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 21..82% dari Realisasi TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.	REALISASI T.A.	%
	2024	2023	
Belanja Barang Operasional	217.823.582.681	218.235.395.821	(1..79)
Belanja Barang Non Operasional	3.010.134.633	6.215.013.466	50..29
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	875.452.000	480.163.813	(35..19)
Belanja Jasa	27.879.754.630	22.493.861.410	23..35
Belanja Pemeliharaan	5.536.821.688	2.941.465.356	3..69
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	35.733.883.315	46.218.177.697	30..46
Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.313.988.453	3.333.631.241	99..85

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	
Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	297.173.617.400	206.481.841.665	21..70
Pengembalian Belanja	2.119.143.786	788.276.260	(7..76)
Jumlah Belanja	295.054.473.614	205.693.565.405	21..82

Belanja Modal
Rp1.594.150.000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.594.150.000.00 dan Rp35.712.189.719..00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar (18..55%) dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh Tahun 2023 penurunan pada belanja modal gedung dan bangunan dan belanja peralatan dan mesin sedangkan untuk belanja modal modal lainnya mengalami kenaikan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0..00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.594.150.000	3.961.181.175	(0.40)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan.. Irigasi dan Jaringan	0-	0-	0..00
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	1.594.150.000	3.961.181.175	(0.40)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	1.594.150.000	3.961.181.175	(0.40)

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah

masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0.00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan belanja moda pembuatan sertifikat tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	-	0
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	-	0

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp1.594.150.000*

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.594.150.000.00 dan Rp23.316.194.854..00.. mengalami penurunan sebesar (8..91%) bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan pagu belanja modal Peralatan dan Mesin setelah revisi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.594.150.000	3.961.181.175	(0.40)
Jumlah Belanja Kotor	1.594.150.000	3.961.181.175	(0.40)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.594.150.000	3.961.181.175	(0.40)

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan*

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024

Rp0

dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0% dibandingkan realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari sumber dana Rupiah Murni.. masih terdapat kesalahan penempatan akun belanja.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0

Belanja Modal
Jalan.. Irigasi..
dan Jaringan Rp
0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan.. Irigasi.. dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan.. Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan

Rp0.00 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0% dibandingkan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja pembuatan dan pengembangan aplikasi diantaranya Aplikasi SIHALAL dan kesalahan akun belanja barang yang seharusnya memakai akun belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	-	0
Jumlah Belanja	0	0	

c. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0..00 dan Rp0.00. Kas di Bendahara Pengeluaran.. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai.. dikelola.. dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Rekening BRI (Saldo UP)	0	0
Rekening BSI (Saldo TUP)	0	0
-	-	-
Jumlah	0	0

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah

masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp32.935.282.314.00. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek.. bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas.. investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan atau berarti. Karenanya.. suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp15.859.100*

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp15.859.100.00 dan Rp9.192.270.00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak 2023 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.859.100	9.192.270
Jumlah	15.859.100	9.192.270

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp(79.295.00)*

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp79.295.00) dan (Rp45.961.00). Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
------------------	-----------------------------------	--------------	---------------------

Piutang Bukan Pajak				
	Lancar	-	0..5%	-
	Kurang Lancar	-	10%	-
	Diragukan	-	50%	-
	Macet	-	100%	-
Jumlah		-		-

Persediaan

Rp1.196.960.033

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.027.178.371..00 dan Rp634.392.927.00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.. dan/atau untuk dijual.. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2023
Barang Konsumsi	1.027.178.371	1.512.042.131
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	0	0
Jumlah	1.027.178.371	1.512.042.131

Tanah

Rp2.875.200.000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.875.200.000.00 dan Rp2.875.200.000.00 Nilai Tanah tersebut tidak mengalami kenaikan disebabkan tidak adanya pembelian baru/transer masuk dari pihak lain

sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	2.875.200.000
Mutasi tambah :	
Saldo Awal	
Transfer Masuk	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.875.200.000

Peralatan dan
Mesin Rp

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp245.943.349.789..00 dan Rp224.938.370.752..00. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	94.316.697.197
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	94.316.697.197
Pembelian	1.594.150.000
Transfer Masuk	0
Perolehan Lainnya	0
Pengembangan Nilai Aset Langsung	0
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
Saldo per 31 Desember 2024	95.548.956.194
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(361.891.003)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Penambahan dari pencatatan saldo awal senilai Rp94.316.697
- Penambahan dari pembelian Alat Kantor (3.05.01) Rp278.000.000
- Penambahan dari pembelian Alat Rumah Tangga (3.05.02)
Rp153.900.000

- d. Penambahan dari pembelian Alat Studio (3.06.01) Rp996.100.000.00;
 - e. Penambahan dari pembelian Alat Kantor (3.05.01) Rp589.211.864..00;
 - f. Penambahan dari pembelian Alat Rumah Tangga (3.05.02) Rp1.331.016.688..00;
 - g. Penambahan dari pembelian Alat Studio (3.06.01) Rp702.419.200..00;
 - h. Penambahan dari Pembelian Peralatan Komputeri (3.06.02) Rp166.150.000.00;
- Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp84.893.859.082*

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp84.893.859.082.00 dan Rp848.893.859.082 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	84.893.859.082
---	-----------------------

Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Pengembangan Nilai Aset Langsung	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 31 Desember 2024	84.893.859.082
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	84.893.859.082

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

*Jalan.. Irigasi
dan Jaringan
Rp5.058.053.680*

C.9 Jalan.. Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan.. Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp98.751.015.00 dan Rp98.751.015.00. Mutasi transaksi terhadap Jalan.. Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	5.058.053.680
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	Rp 98.751.015
Hibah Masuk	0
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	0
Saldo per	98.751.015
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	98.751.015

C.10 Aset Tetap Lainnya Lanjut di rumah

Aset Tetap Lainnya
Rp0.00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah.. peralatan dan mesin.. gedung dan bangunan.. jalan.. irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0.00 dan Rp0.00. Aset tetap tersebut. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	0
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	0
Pembelian	0
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(81.058.364.959
)

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(81.058.364.959.00) dan Rp314.641.978.003..00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	95.548.956.194	-71718331620	95.548.956.194
2	Gedung dan Bangunan	84.893.859.082	-9306858534	84.893.859.082
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	98.751.015	-11109492	98.751.015
4	Aset Tetap Lainnya	25.217.500	-22065313	25.217.500
Jumlah		180.566.783.791	81.058.364.959	180.566.783.791

Aset Tak Berwujud
Rp5.082.573.500

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp5.082.573.500 dan Rp18.464.154.213..00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki.. tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI berupa Software. Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	2.567.173.500
Mutasi tambah:	
Pembelian	634.600.000
Koreksi Aset Tak Berwujud (Software)	3.150.000.000
Pengembangan Nilai Aset Langsung	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	5.082.573.500
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-2446642816
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5.082.573.500

C.13 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0.00 dan Rp.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	389.426.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(2.446.642.816.00)

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp(2.446.642.816.00) dan Rp(1.431.828.438.00) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
---------------------	------------------------	---	-------------------

Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	5.082.573.500	(2.446.642.816)	5.082.573.500
Aset Lain-lain			-
Total	5.082.573.500	(2.446.642.816)	5.082.573.500

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp36.270.229.047.00 dan Rp27.207.711.310.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	3.408.878.341	
Dana Pihak Ketiga	32.861.350.706	
Total	36.270.229.047	

C.16 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp33.424.658.00 dan Rp0.00. Pendapatan Diterima Dimuka Jurnal Koreksi atas Pengakuan Pendapatan Kerjasama BLU : Terdapat Pendapatan Diterima di Muka atas sewa ATM dengan nomor kontrak B.3823.e-v/KC/LOG/11/2023 pada tanggal 19 Oktober 2023. kontrak berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 Oktober 2025.. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Pendapatan Diterima Dimuka	33.424.658.	0
Total	33.424.658.	0

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0..00 dan Rp0.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	0
Tambahan Uang Persediaan	0
Total	0

Ekuitas Rp
338.662.205.010

C.18 Ekuitas

Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp338.662.205.010..00 dan Rp233.131.197.480. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp132.180.457.43

6

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp132.180.457.436.00 dan Rp161.477.616.557.00. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1.341%. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	50.288.858.851	786.02
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	640.883.130	104.47-
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	50.440.885.000	201.76
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	8.942.258.325	279.45
Pendapatan Lain-lain BLU	2131.5770.526	676.99
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	9.497.500	1.76
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	533.111.834	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9.192.270	0
JUMLAH :	132.180.457.436	339.8

Beban Pegawai

Rp67.609.912.504

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp67.609.912.504..00 dan Rp71.064.325.910..00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi.. baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pejabat negara.. Pegawai Negeri Sipil (PNS).. dan pegawai yang dipekerjakan pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	7.610.930.500	27.266.875.866	(9..87)
Beban Pambulan Gaji PNS	0	411.860	(15..47)
Pengembalian Beban Pambulan Gaji PNS	106.503	(14.983)	(47..08)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	1.948.635.446	(8..20)
Beban Tunj. Anak PNS	536.598.060	589.647.056	(6..07)
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	170.044.852	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	346.750.000	346.750.000	(26..05)
Beban Tunj. Fungsional PNS	546.048.000	3.288.956.930	8..50
Beban Tunj. PPh PNS	93.001.430	165.255.637	(4..61)
Beban Tunj. Beras PNS	399.541.140	1.717.439.860	(23..52)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	839.719.700	-	-
Beban Uang Makan PNS	236.280.000	3.404.487.333	-
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	0	500.770.000	-
Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	0	163.405.000	-
Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	0	-	-
Beban Gaji Pokok PPPK	1.541.490.400	-	-
Beban Pambulan Gaji PPPK	0	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	78.661.920	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	20.637.472	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	240.112.000	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	77.779.080	-	-
Beban Uang Makan PPPK	198.929.000	958.529.000	(15..61)
Beban Uang Lembur	39.654.000	194.309.000	(30..18)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8.692.757.469	-	-
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.502.404.930		
Jumlah belanja	67.069.912.504	71.064.325.910	(5..62)

Beban Persediaan Rp469.871.559

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp469..00 dan Rp1.318.528.359..00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai.. termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 65..91 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Pemakaian Barang Persediaan saldo tahun lalu serta karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	469.871.559	775.578.082	(39.417)
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0
Jumlah	469.871.559	775.578.082	(39.417)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp255.328.788.074.
00*

D.4 Beban Barang Jasa

Beban Barang dan Jasa yang berakhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp255.328.788.074.00 dan Rp316.936.469.523..00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar (19.438).persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.
	2024
Beban Keperluan Perkantoran	5.489.716.681
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	283.986.000
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0
Beban Barang Operasional Lainnya	212.049.880.000
Beban Bahan	1.862.234.633
Beban Honor Output Kegiatan	1.139.400.000
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	8.500.000
Beban Langganan Listrik	498.272.642
Beban Langganan Telepon	1.836.162
Beban Jasa Konsultan	715.519.075
Beban Sewa	4.385.905.856
Beban Jasa Profesi	1.455.265.000
Pengembalian Beban Jasa Profesi	0
Beban Jasa Lainnya	17.630.235.054
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.153.685.200
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.383.136.488
Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.291.233.211
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.831.354.000
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.730.364.955
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.880.931.149
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	6.313.988.453
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0
Beban Barang	1.006.404.860
Beban Jasa	8.742.808.511
Beban Perjalanan	6.868.921.185
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	72.650.000
Jumlah Beban Barang Jasa	Rp255.328.788.074

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.535.630.088.00 dan Rp2.943.386.488.00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.153.685.200
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.383.136.488
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
Beban Pemeliharaan Jaringan	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0
Jumlah Belanja	15.288.906.934

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Sampai Periode Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp45.555.040.865.00 dan Rp70.878.721.499.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.. fungsi.. dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2023
Beban Perjalanan Biasa	17.291.233.211
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.831.354.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.730.364.955
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.880.931.149
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	6.313.988.453
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0
Jumlah Belanja	45.555.040.865

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat*

Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2023 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp(2.446.642.816)*

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp2.446.642.816.00) dan

(Rp1.431.828.438). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.526.796.580
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.746.133.263
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
Beban Penyusutan Irigasi	0
Beban Penyusutan Jaringan	2.468.776
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.304.375
Jumlah Penyusutan	(2.446.642.816)
Beban Amortisasi Aplikasi	0
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-
Jumlah Amortisasi	6.406.700.029
Jumlah	13.281.702.994

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah.. Gedung dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk

Lainnya Rp0

periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan (Rp121.836.000.00)

*Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
TA 2023 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9.192.270	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	533.111.834	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
Jumlah	542.034.104	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp233.131.197.480*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp233.131.197.480..00 dan Rp219.235.426.486.00.

*Surplus(defisit) LO
Rp(3
)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar (Rp105.941.637.530.00) dan (Rp13.894.328.744.00) Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional. kegiatan non operasional. dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar Rp0*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi yang
Menambah/Mengur
angi Ekuitas
Rp(410.630.000)*

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp410.630.000) dan Rp1.442.250.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp(410.630.000)*

E.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk tahun 2023 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp410.630.000.00) dan Rp6.432.750.00). Rincian untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(410.530.000)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	(410.530.000)

Koreksi Lain Lain
Rp0

D.6 Koreksi Lain Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara.. antara lain koreksi atas pendapatan.. koreksi atas beban.. koreksi atas hibah.. piutang dan utang. Koreksi ini adalah Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain Lain Tahun 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp114.947.368.776

D.7 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL).. antar KL.. antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024

Transaksi Antar Entitas	2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	(16.690.784.556)
Diterima dari Entitas Lain	131.638.153.332
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Jumlah	114.947368.776

Kenaikan/Penurunan Ekuitas
Rp105.531.007.530.00

D.8 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp105.531.007.530.00 dan Rp13.895.770.994.00.

Ekuitas Akhir

D.9 Ekuitas Akhir

Rp338.662.205.010

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp338.662.205.010.00 dan Rp233.131.197.480.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. Perubahan Menjadi Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK)

Pada tahun 2024, telah terjadi perubahan signifikan dalam bentuk kelembagaan dan struktur organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Perubahan ini ditujukan untuk memperkuat profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan jaminan produk halal secara nasional. Sejalan dengan itu, dilakukan pula penataan ulang struktur organisasi BPJPH sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Struktur baru mencakup pembentukan jabatan Kepala dan Wakil Kepala, tiga deputi utama, sekretariat, serta unit-unit pendukung seperti Inspektorat, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Pengembangan SDM Jaminan Produk Halal. Penataan ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola internal, memperjelas pembagian fungsi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Perubahan badan hukum dan struktur organisasi ini memiliki dampak langsung terhadap sistem pelaporan keuangan, pengelolaan anggaran, serta penyesuaian dalam pengelolaan sumber daya manusia dan aset. Oleh karena itu, pencatatan dalam laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan yang berlaku agar tetap mencerminkan kondisi yang wajar dan andal.

b. Kebijakan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan Daerah Tahun 2025.

BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merasakan adanya dampak pada pendapatan yang berasal dari entitas satu kementerian maupun kementerian lainnya. Kebijakan efisiensi ini mendorong seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penghematan dalam pelaksanaan anggaran, termasuk dalam kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan operasional yang dapat melibatkan BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagai konsekuensinya, potensi perolehan pendapatan BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari kerjasama atau pemanfaatan layanan oleh instansi pemerintah lainnya menjadi lebih terbatas. Hal ini menuntut BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk lebih adaptif dalam mengelola keuangan dan mencari sumber pendapatan alternatif. Manajemen BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyadari bahwa kebijakan efisiensi ini merupakan tantangan yang perlu dihadapi dengan strategi yang tepat. Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka peluang bagi BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan layanan yang lebih efisien dan menarik bagi berbagai pihak, termasuk non-pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kemandirian finansial di masa depan. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meliputi peningkatan efisiensi internal, diversifikasi layanan, serta penajakan kerjasama dengan berbagai pihak di luar lingkungan kementerian. Dengan demikian, BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang berkualitas meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Atas implementasi dari peraturan ini merupakan suatu peristiwa setelah tanggal pelaporan yang tidak memerlukan koreksi, namun diperlukan pengungkapan berdasarkan informasi terkini walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tahun anggaran 2024. Peristiwa ini perlu diungkapkan karena sifat peristiwa yang terjadi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisikeuangan entitas setelah tahun pelaporan dan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.

c. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Periode Semester II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 32.861.350.704.00 terdiri dari : Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas pada rekening dana kelolaan yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan BLU. karena merupakan dana titipan pihak ketiga sebesar Rp32.861.350.704.00

- PT Bank Syariah Indonesia. Tbk no. Rek 1110201717 sebesar Rp8.747.673.165
- PT Bank Tabungan Negara Syariah. Tbk no. Rek 7201888817 sebesar Rp 16.066.503.028
- PT Bank Muamalat Indonesia. Tbk. No. Rek 3010808888 sebesar Rp5.214.763.301
- PT Bank Muamalat Indonesia. Tbk. No. Rek 3010228478 sebesar Rp272.567.048
- PT Bank Tabungan Negara. Tbk. No. Rek 0001401300026222 sebesar Rp1.001.128.003
- PTBank Mandiri (Persero). Tbk. No. Rek 1290087787780 sebesar Rp1.558.716.159

Jumlah

Rp32.861.350.704

d. Kas lainnya dibendahra Pengeluaran

- Merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor sebesar Rp73.931.608

e. Rekening Kas pada Badan Layanan Umum

Kas dan Bank pada Badan Layanan Umum adalah nilai kas yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana BLU baik yang ditempatkan pada rekening bank. Rincian kas dan Bank - BLU adalah sebagai berikut :

- PTBank Syari'ah Indonesia. Tbk. No. Rek 7800000178 sebesar Rp429.466.786
- PTBank Mandiri (Persero). Tbk. No. Rek 1290013220344 sebesar Rp2.591.018.366
- PTBank Mandiri (Persero). Tbk. No. Rek 1290013221920 sebesar Rp7.292.361
- PT Bank Tabungan Negara. Tbk. No. Rek 7201888821 sebesar Rp229.243.453.459

f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah Rp3.408.878.341 yang masuk dalam rekening penampungan rekening akhir tahun (RPATA) adalah rekening lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

- Pekerjaan Pemeliharaan dan Aktivasi Hydrant BPJPH. CV ALDIMA BUMI ARTHA sebesar Rp 360.000.000
- Belanja Sewa Cloud Server. PT SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA sebesar Rp414.900.000
- Pengadaan Lisensi Zimbra Network Profesional Edition. QUALITA GLOBAL TEKNOLOGI sebesar Rp 536.500.000
- Pemeliharaan dan Aktivasi Smoke Detector Sistem Fire Alarm Gedung BPJPH. HARFAD MANDIRI sebesar Rp225.000.000
- Pengembangan Omni Communication Assistant (OCA) Platform Kementerian Agama. TELEKOMUNIKASI INDONESIA. TBK sebesar Rp1.872.478.341

g. Jurnal koreksi atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

1. Jurnal Koreksi atas Pengakuan Pendapatan Kerjasama BLU : Terdapat Pendapatan Diterima di Muka atas sewa ATM dengan nomor kontrak B.3823.e-v/KC/LOG/11/2023 pada tanggal 19 Oktober 2023. kontrak berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 Oktober 2025 senilai Rp33.424.658
2. Koreksi aset tak berwujud berupa aplikasi SIHALAL yang direalisasikan melalui Belanja Barang senilai Rp3.150.000.000
3. Reklasifikasi pendapatan (temuan pemeriksaan interim) / Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya senilai Rp135.750.000
4. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha/ Reklasifikasi pendapatan (temuan pemeriksaan interim) senilai Rp3.497.500
5. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga/Reklasifikasi pendapatan (temuan pemeriksaan interim) senilai Rp166.100.000
6. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya/Reklasifikasi pendapatan (temuan pemeriksaan interim) senilai Rp13.651.493.769
7. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU/Reklasifikasi pendapatan (temuan pemeriksaan interim) senilai Rp585.276.667
8. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran/Koreksi atas Kas Lainnya dan setara kas untuk Kas lainnya di BP - Uang di BPP yang sudah menjadi belanja sesuai SPM 231 (Perjadin Komite Fatwa) namun masi tercatat pada sistem karena kesalahan sistem senilai Rp10.764.230
9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih / Piutang Lainnya/Penyajian piutang akibat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2024 Senilai Rp65584
10. Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)/ Koreksi atas Pengembalian Belanja Pegawai Berupa Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember 2024 senilai Rp13.116.800
11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih / Piutang Lainnya/Penyajian piutang akibat kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2024 senilai Rp13.711
12. Beban Uang Makan PNS/Koreksi atas Pengembalian Belanja Pegawai Berupa Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2024 senilai Rp2.742.300

Kriteria

- i. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran. Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- k. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- l. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- m. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.

- n. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 Teknis Penatausahaan. Pembukuan. dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan *Monitoring* Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan. Pembukuan. dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 445372
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	340.539.537.000	340.539.537.000	0
2	Belanja	337.784.264.726	337.784.264.726	0
3	Pengembalian Belanja	-3.382.285.350	-3.382.285.350	0
4	Estimasi Pendapatan	38.900.000.000	38.900.000.000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	132.180.457.436	132.180.457.436	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	839.628.272	839.628.272	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	839.628.272	839.628.272	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	232.271.230.973	232.271.230.973	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 04-FEB-25



LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 025
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 445372
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
DKI JAKARTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 08/05/25 1:34 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker_poc
Tgl Data : 07/05/25 11:09 PM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	318.550.823.092	320.494.987.176	(1.944.164.084)	(0.607)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	64.076.102.620	0	64.076.102.620	
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	50.471.235.000	0	50.471.235.000	
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	610.955.972	1.220.400.000	(609.444.028)	(49.938)
Pendapatan BLU Lainnya	16.446.435.082	100.943.776.002	(84.497.340.920)	(83.707)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	450.155.551.766	422.659.163.178	27.496.388.588	6.506
JUMLAH PENDAPATAN	450.155.551.766	422.659.163.178	27.496.388.588	6.506
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	23.165.953.947	18.722.663.913	4.443.290.034	23.732
Beban Persediaan	469.871.559	775.578.082	(305.706.523)	(39.417)
Beban Barang dan Jasa	255.328.788.074	316.936.469.523	(61.607.681.449)	(19.438)
Beban Pemeliharaan	5.535.630.088	2.943.386.488	2.592.243.600	88.07
Beban Perjalanan Dinas	45.555.040.865	53.812.878.545	(8.257.837.680)	(15.345)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	14.158.596.369	15.434.766.297	(1.276.169.928)	(8.268)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	33.334	17.255.586	(17.222.252)	(99.807)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	344.213.914.236	408.642.998.434	(64.429.084.198)	(15.767)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	105.941.637.530	14.016.164.744	91.925.472.786	655.853
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(121.836.000)	121.836.000	(100)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	542.304.104	60.533.840.555	(59.991.536.451)	(99.104)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	542.304.104	60.655.676.555	(60.113.372.451)	(99.106)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	(121.836.000)	121.836.000	(100)
SURPLUS/DEFISIT - LO	105.941.637.530	13.894.328.744	92.047.308.786	662.481

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I	: 12	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
WILAYAH/PROVINSI	: 0100	DKI JAKARTA
JENIS SATUAN KERJA	: K8	
SATUAN KERJA	: 445372	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tgl Data : 07/05/25 11:09 PM

Kode Lap : LPE.BLU.STK

Tanggal : 08/05/25 1:34 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_blu_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	233.131.197.480	219.235.426.486	13.895.770.994	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	105.941.637.530	13.894.328.744	92.047.308.786	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(410.630.000)	1.442.250	(412.072.250)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	7.875.000	(7.875.000)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(410.630.000)	(6.432.750)	(404.197.250)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0	0	0	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	105.531.007.530	13.895.770.994	91.635.236.536	-
EKUITAS AKHIR	338.662.205.010	233.131.197.480	105.531.007.530	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 12
SATUAN KERJA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 445372

Tgl Data : 07/05/25 8:12 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 1:34 AM
Halaman : 1
lap_blu_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	38.900.000.000	132.180.457.436	93.280.457.436	340	12.037.718.000	161.477.616.557	(149.439.898.557)	1.341
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	38.900.000.000	131.638.153.332	92.738.153.332	338	12.037.718.000	100.943.776.002	(88.906.058.002)	839
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	542.304.104	542.304.104	0	0	60.533.840.555	(60.533.840.555)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	38.900.000.000	132.180.457.436	93.280.457.436	340	12.037.718.000	161.477.616.557	(149.439.898.557)	1.341
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	340.539.537.000	335.241.607.648	(5.297.929.352)	98	340.608.411.000	336.563.109.068	4.045.301.932	99
1. Belanja Pegawai	23.650.501.000	23.172.620.777	(477.880.223)	98	18.914.782.000	18.735.240.983	179.541.017	99
2. Belanja Barang	315.287.439.000	310.474.836.871	(4.812.602.129)	98	317.732.369.000	313.866.686.910	3.865.682.090	99
3. Belanja Modal	1.601.597.000	1.594.150.000	(7.447.000)	100	3.961.260.000	3.961.181.175	78.825	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 12
SATUAN KERJA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 445372

Tgl Data : 07/05/25 8:12 PM
Tgl Cetak : 08/05/25 1:34 AM
Halaman : 2
lap_blu_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	340.539.537.000	335.241.607.648	(5.297.929.352)	98	340.608.411.000	336.563.109.068	4.045.301.932	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris Utama

Dr. MUHAMMAD AQIL IRHAM
Pembina Utama (IV/E)

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

UNIT ORGANISASI

: 12

WILAYAH/PROVINSI

: 0100

SATUAN KERJA

: 445372

KEMENTERIAN AGAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DKI JAKARTA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tgl Data 07/05/25 10:23 PM

Tgl. Cetak 08/05/2025 1:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	73.931.608	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	32.861.350.706	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	232.271.230.973	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	15.859.100	0
0.0	115613	Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima	0	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	79.295
0.0	117111	Barang Konsumsi	1.027.178.371	0
0.0	131111	Tanah	2.875.200.000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	95.548.956.194	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	84.893.859.082	0
0.0	134113	Jaringan	98.751.015	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	25.217.500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	71.718.331.620
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	9.306.858.534
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	11.109.492
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	22.065.313
0.0	162151	Software	5.082.573.500	0
0.0	162161	Lisensi	0	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	3.408.878.341	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	361.891.003	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	361.891.003
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2.084.751.813
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	0
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212144	Pengeluaran transit yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	3.408.878.341
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	32.861.350.706
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	33.424.658
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	73.931.608
0.0	391111	Ekuitas	0	233.131.197.480
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	410.630.000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

WILAYAH/PROVINSI : 0100

DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : 445372

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tgl Data 07/05/25 10:23 PM

Tgl. Cetak 08/05/2025 1:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	64.076.102.620
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	610.955.972
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	321.933.108.442
3.1	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	3.382.285.350	0
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	50.471.235.000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	9.527.534.992
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	6.912.900.090
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	6.000.000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9.192.270
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	533.111.834
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	7.610.930.500	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	371.400
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	106.503	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	5.576
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	536.598.060	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	170.044.852	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	346.750.000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	546.048.000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	93.001.430	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	399.541.140	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	839.719.700	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	236.280.000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370.000
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1.541.490.400	0
3.1	511611	Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	0	3.222.200
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	22.753	0
3.1	511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	86
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	78.661.920	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	20.637.472	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	240.112.000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	77.779.080	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	198.929.000	0
3.1	511628	Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	0	1.546.000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	39.654.000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8.692.757.469	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.502.404.930	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	5.489.716.681	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	283.986.000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

UNIT ORGANISASI : 12

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 445372

KEMENTERIAN AGAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DKI JAKARTA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tgl Data 07/05/25 10:23 PM

Tgl. Cetak 08/05/2025 1:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	1.056.400
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	212.049.880.000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1.862.234.633	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1.139.400.000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	12.075.000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	8.500.000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	498.272.642	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1.836.162	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	715.519.075	0
3.0	522141	Beban Sewa	4.385.905.856	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1.455.265.000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	695.000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	17.630.235.054	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.153.685.200	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1.191.600
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.383.136.488	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.291.233.211	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0	1.735.725.565
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.831.354.000	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	856.160.000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.730.364.955	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	123.385.614
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.880.931.149	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	523.317.836
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	6.313.988.453	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	123.163.073
3.0	525112	Beban Barang	1.006.404.860	0
3.0	525113	Beban Jasa	8.742.808.511	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	6.868.921.185	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	72.650.000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.526.796.580	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.746.133.263	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2.468.776	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.304.375	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	876.893.375	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	0	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	469.871.559	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	33.334	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
UNIT ORGANISASI : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 445372

KEMENTERIAN AGAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
DKI JAKARTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tgl Data 07/05/25 10:23 PM

Tgl. Cetak 08/05/2025 1:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	542.304.104	0
JUMLAH			810.476.296.433	810.476.296.433

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

WILAYAH/PROVINSI : 0100

DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : 445372

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tgl Data 07/05/25 10:46 PM

Tgl. Cetak 08/05/2025 1:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	16.690.784.556
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	131.638.153.332	0
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	50.288.858.851
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	640.883.130
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	321.933.108.442
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	3.382.285.350	0
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	50.440.885.000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	8.942.258.325
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	21.315.770.526
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	9.497.500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9.192.270
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	533.111.834
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7.610.930.500	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	371.400
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	106.503	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	5.576
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	536.598.060	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	170.044.852	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	346.750.000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	546.048.000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	93.001.430	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	399.541.140	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	842.462.000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	236.280.000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370.000
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.541.490.400	0
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	3.222.200
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	22.753	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	86
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	78.661.920	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	20.637.472	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	240.112.000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	77.779.080	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	198.929.000	0
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	1.546.000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	39.654.000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8.696.681.999	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.502.404.930	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

UNIT ORGANISASI

: 12

WILAYAH/PROVINSI

: 0100

SATUAN KERJA

: 445372

KEMENTERIAN AGAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DKI JAKARTA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tgl Data 07/05/25 10:46 PM

Tgl. Cetak 08/05/2025 1:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5.489.716.681	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	283.986.000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1.056.400
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	212.049.880.000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1.862.234.633	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.139.400.000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	12.075.000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.500.000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	862.657.003	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	540.929.547	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1.900.098	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	715.519.075	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4.385.905.856	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1.455.265.000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	695.000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	20.780.235.054	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.153.685.200	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1.191.600
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.383.136.488	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.291.233.211	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1.735.725.565
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.831.354.000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	856.160.000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.730.364.955	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	123.385.614
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.880.931.149	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	523.317.836
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	6.313.988.453	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	123.163.073
3.0	525112	Belanja Barang	1.006.404.860	0
3.0	525113	Belanja Jasa	8.742.808.511	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	6.868.921.185	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	72.650.000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.594.150.000	0
3.0	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	542.304.104	0
JUMLAH			474.186.635.784	474.186.635.784

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

null null

null

KODE SATKER : 445372

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tgl Data 07/05/25 11:09 PM

Tgl. Cetak 08/05/2025 1:34 AM

lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	32.935.282.314	25.906.409.382	7.028.872.932	27.13
Kas pada Badan Layanan Umum	232.271.230.973	117.323.862.197	114.947.368.776	97.97
Piutang Bukan Pajak	15.859.100	9.192.270	6.666.830	72.53
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(79.295)	(45.961)	(33.334)	72.53
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	15.779.805	9.146.309	6.633.496	72.53
Persediaan	1.027.178.371	634.392.927	392.785.444	61.92
JUMLAH ASET LANCAR	266.249.471.463	143.873.810.815	122.375.660.648	85.06
ASET TETAP				
Tanah	2.875.200.000	2.875.200.000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	95.548.956.194	94.316.697.197	1.232.258.997	1.31
Gedung dan Bangunan	84.893.859.082	84.893.859.082	0	0.00
Jalan. Irigasi dan Jaringan	98.751.015	98.751.015	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	25.217.500	25.217.500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(81.058.364.959)	(68.138.552.968)	(12.919.811.991)	18.96
JUMLAH ASET TETAP	102.383.618.832	114.071.171.826	(11.687.552.994)	(10.25)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	5.082.573.500	2.567.173.500	2.515.400.000	97.98
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3.408.878.341	1.258.581.087	2.150.297.254	170.85
Aset Lain-lain	361.891.003	0	361.891.003	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2.446.642.816)	(1.431.828.438)	(1.014.814.378)	70.88
JUMLAH ASET LAINNYA	6.406.700.028	2.393.926.149	4.012.773.879	167.62
JUMLAH ASET	375.039.790.323	260.338.908.790	114.700.881.533	44.06
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	36.270.229.047	27.207.711.310	9.062.517.737	33.31
Pendapatan Diterima Dimuka	33.424.658	0	33.424.658	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	73.931.608	0	73.931.608	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	36.377.585.313	27.207.711.310	9.169.874.003	33.70
JUMLAH KEWAJIBAN	36.377.585.313	27.207.711.310	9.169.874.003	33.70
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	338.662.205.010	233.131.197.480	105.531.007.530	45.27
JUMLAH EKUITAS	338.662.205.010	233.131.197.480	105.531.007.530	45.27
JUMLAH EKUITAS	338.662.205.010	233.131.197.480	105.531.007.530	45.27

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 12	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
null	null
KODE SATKER : 445372	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tgl Data 07/05/25 11:09 PM
Tgl. Cetak 08/05/2025 1:34 AM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	375.039.790.323	260.338.908.790	114.700.881.533	44.06

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 445372
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
DKI JAKARTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 08/05/25 1:35 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 07/05/25 11:50 PM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	318.550.823.092	320.494.987.176	(1.944.164.084)	(0.61)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	50.288.858.851	0	50.288.858.851	0
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	50.440.885.000	0	50.440.885.000	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	640.883.130	0	640.883.130	0
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	30.267.526.351	100.943.776.002	(70.676.249.651)	(70.02)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0
Pendapatan PNBPN Umum	542.304.104	60.533.840.555	(59.991.536.451)	(99.1)
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	450.731.280.528	481.972.603.733	(31.241.323.205)	(6.48)
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(23.172.620.777)	(18.735.240.983)	(4.437.379.794)	23.68
Pembayaran Barang	(221.826.990.774)	(225.727.011.284)	3.900.020.510	(1.73)
Pembayaran Jasa	(36.621.868.141)	(28.245.296.910)	(8.376.571.231)	29.66
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(862.657.003)	(480.163.813)	(382.493.190)	79.66
Pembayaran Pemeliharaan	(5.535.630.088)	(2.941.465.356)	(2.594.164.732)	88.19
Pembayaran Perjalanan Dinas	(45.555.040.865)	(53.852.530.547)	8.297.489.682	(15.41)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(72.650.000)	(2.620.219.000)	2.547.569.000	(97.23)
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(542.304.104)	(60.533.840.555)	59.991.536.451	(99.1)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(334.189.761.752)	(393.135.768.448)	58.946.006.696	(14.99)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	116.541.518.776	88.836.835.285	27.704.683.491	31.19
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 445372
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
DKI JAKARTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 08/05/25 1:35 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 07/05/25 11:50 PM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(1.594.150.000)	(3.961.181.175)	2.367.031.175	(59.76)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Perolehan atas Jalan. Irigasi. dan Jaringan	0	0	0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	0	0	0
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(1.594.150.000)	(3.961.181.175)	2.367.031.175	(59.76)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(1.594.150.000)	(3.961.181.175)	2.367.031.175	(59.76)
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	0	2.007.456.986	(2.007.456.986)	(100)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	2.007.456.986	(2.007.456.986)	(100)
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	(2.007.456.986)	2.007.456.986	(100)
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	(2.007.456.986)	2.007.456.986	(100)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 445372
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
DKI JAKARTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 08/05/25 1:35 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 07/05/25 11:50 PM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	114.947.368.776	84.875.654.110	30.071.714.666	35.43
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	117.323.862.197	32.448.208.087	84.875.654.110	261.57
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	232.271.230.973	117.323.862.197	114.947.368.776	97.97
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	232.271.230.973	117.323.862.197	114.947.368.776	97.97
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0	0
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	232.271.230.973	117.323.862.197	114.947.368.776	97.97
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I	: 12	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
WILAYAH/PROVINSI	: 0100	DKI JAKARTA
JENIS SATUAN KERJA	: K8	
SATUAN KERJA	: 445372	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Tgl Data : 07/05/25 11:09 PM

Kode Lap : LPSAL.SATKER

Tanggal : 08/05/25 1:35 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpsal_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	117.323.862.197	32.448.208.087	84.875.654.110	261.57
PENGUNAAN SAL	0	0	0	0
Sub Total	117.323.862.197	32.448.208.087	84.875.654.110	261.57
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(203.061.150.212)	(175.085.492.511)	(27.975.657.701)	15.98
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	318.008.518.988	259.961.146.621	58.047.372.367	22.33
Pendapatan Alokasi APBN	318.550.823.092	320.494.987.176	(1.944.164.084)	(0.61)
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(542.304.104)	(60.533.840.555)	59.991.536.451	(99.1)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Transaksi antar BLU	0	0	0	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	114.947.368.776	84.875.654.110	30.071.714.666	35.43
Sub Total	232.271.230.973	117.323.862.197	114.947.368.776	97.97
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	232.271.230.973	117.323.862.197	114.947.368.776	97.97